

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2019
(Studi di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Oleh :

Marberi Nardo

07011281520194

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(STUDI DI DESA KOTA AGUNG KECAMATAN KOTA
AGUNG KABUPATEN LAHAT)

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Marberi Nardo
07011281520194

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, September 2021

Pembimbing I

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 (Studi di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat)" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 7 Oktober 2021.

Inderalaya, 7 Oktober 2021

Ketua

1. Ermanovida, S. Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Anggota

2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

3. Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001

4. Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009

Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zaitani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

The title of this research is "Accountability of Village Financial Management (Study in Kota Agung village, Kota Agung Subdistrict, Lahat District)". In the management of village finance demanded an aspect of good governance where one of the pillars is accountability. The allocation of sufficiently large funds is expected to have a significant impact on the welfare of the village community, and can really be reported and accounted for. The background of this research is the low development in Kota Agung Village. The purpose of this research is to find out how Accountability of Village Financial Management in Kota Agung Village, Kota Agung Subdistrict, Lahat District. This research was conducted in Kota Agung Village, Kota Agung Subdistrict, Lahat Regency using qualitative research methods. Data collection techniques used were in-depth interviews, observations, and documentation. In this study researchers have conducted in-depth interviews. The analysis techniques used are data collection reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the accountability of village financial management in Kota Agung Village, Kota Agung Subdistrict, Lahat District has been carried out based on information activities, action activities and response activities. In reporting and accountability it has been carried out in accordance with a mechanism based on the provisions even though there are still negligence from village officials and technical managers of activities. The competency of management resources is still the main obstacle, so it still needs assistance from the regional government. To increase accountability in village financial management in Kota Agung Subdistrict, Lahat District, it is necessary to develop, train, supervise and evaluate continuously the village officials.

Keywords: Accountability, Management, Village Finance.

Supervisor I

Ermanovida, S.Sos., M.Si

NIP. 196911191998032001

Supervisor II

Sofvan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

Inderalaya, November 2021

Chairman of the Department of Public Administration

Faculty of Social and Political Sciences

Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA

NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 (Studi di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat)". Dalam pengelolaan keuangan desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan. Latar belakang dari penelitian ini adalah rendahnya pembangunan di Desa Kota Agung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara mendalam. Teknik analisis yang digunakan adalah pengumpulan data reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat telah dilaksanakan berdasarkan aktivitas informasi (*information*), aktivitas tindakan (*action*) dan aktivitas tanggapan (*response*). Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan. Kompetensi sumber daya pengelola masih merupakan kendala utama sehingga masih perlu pendampingan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat dibutuhkan pembinaan, pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparat desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan, Keuangan Desa

Pembimbing I



Ermanovida, S.Sos., M.Si

NIP. 196911191998032001

Pembimbing II



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

Inderalaya, November 2021

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Zahani Surya Marpaung, S.Sos, MPA

NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat)”. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa Ucapan terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan skripsi yakni kepada:

1. Kedua Orang Tua dan keluarga yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si Selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan serta nasehat kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.

6. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan serta nasehat kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen FISIP UNSRI yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan.
8. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, perhatian, cerita dan pengalaman bagi penulis selama kuliah, dan menerima kekurangan serta kelebihan penulis baik saat senang maupun sedih. Terima kasih juga atas persahabatannya selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari yang diharapkan. Maka dari itu, kritik dan saran dari semua pihak akan sangat berguna bagi penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
ABSTRACT	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR ISTILAH	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis	6

2. Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Teori.....	8
1. <i>Good Governance</i>	8
2. Akuntabilitas	9
3. Pengelolaan	22
4. Keuangan Desa.....	23
5. Pengelolaan Keuangan Desa	28
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Definisi Konsep.....	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Unit Analisis Data	36
E. Jenis dan Sumber Data.....	36
F. Informan Penelitian.....	37
G. Teknik Pengumpulan Data	37
H. Teknik Analisis Data.....	38

I. Sitematika Penulisan.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Kondisi Fisik dan Wilayah.....	41
2. Kependudukan.....	41
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	43
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	46
B. Pembahasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di	
Desa Kota Agung	47
1. Aktivitas Informasi (<i>Information</i>).....	48
2. Aktivitas Tindakan (<i>Action</i>).....	59
3. Aktivitas Tanggapan (<i>Response</i>)	67
C. Hasil Temuan Fokus Penelitian.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbandingan Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kota Agung dari Tahun Anggaran 2018-2019.....	5
2. Penelitian Terdahulu	30
3. Fokus Penelitian	36
4. Penduduk Desa Kota Agung Berdasarkan Jumlah.....	42
5. Penduduk Desa Kota Agung Berdasarkan Usia.....	42
6. Biaya Program Rencana Kerja Pemerintah Desa Kota Agung	55
7. Hasil Temuan Fokus Penelitian	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema Kerangka Pemikiran.....	33
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kota Agung.....	47

DAFTAR ISTILAH

Akuntabilitas	: Pertanggungjawaban
Anggaran	: Perkiraan
Birokrasi	: Sistem Pemerintahan
Evaluasi	: Penilaian
Finansial	: Ketersediaan Keuangan
Good Governance	: Pemerintahan yang Baik
Investasi	: Penanaman Modal atau Uang
Inovatif	: Pembaruan atau Memperkenalkan Sesuatu yang Baru
Korelasi	: Hubungan
Monitoring	: Pemantauan
Merit Sistem	: Kebijakan dan Manajemen SDM Aparatur Negara
Objektif	: Keadaan yang Sebenarnya tanpa Dipengaruhi Pendapat
Observasi	: Pengamatan
Pajak	: Pengutan Wajib
Program	: Tata Olah
Proporsional	: Seimbang
Realisasi	: Proses Menjadikan Nyata
Realistis	: Bersifat Nyata

Retribusi : Pungutan Uang

Transparan : Tembus Pandang

Unit : Komponen

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BHP	: Bagi Hasil Pajak
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
KADUS	: Kepala Dusun
KASI	: Kepala Seksi
KAUR	: Kepala Urusan
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
LPM	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPMD	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesi
PADes	: Pendapatan Asli Desa

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan

PKH : Program Keluarga Harapan

PMD : Pemberdayaan Masyarakat Desa

POSYANDU : Pos Pelayanan Terpadu

PTPKD : Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Desa

PUSKESMAS: Pusat Kesehatan Masyarakat

PUSTU : Puskesmas Pembantu

RAB : Rancangan Anggaran Biaya

RAPBDes : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

RKP : Rencana Kerja Pemerintah

RKPDes : Rencana Kerja Pemerintah Desa

RPJMDes : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

SILPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

SLS : Satuan Lingkungan Setempat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan salah satu masalah dasar yang sedang terjadi saat ini. Birokrasi pemerintahan dipergunakan sebagai media politik penguasa sehingga masyarakat susah untuk menghargai serta mempercayai apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tuntutan masyarakat merupakan bentuk dari semangat reformasi birokrasi yang selalu disuarakan kepada aparat pemerintah untuk bias menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) guna lancarnya pelaksanaan pemerintahan. *Good governance* bisa tercapai jika seluruh pihak yang terkait bisa bekerja sama, berkoordinasi, serta berkomunikasi dengan baik. Terlaksananya *good governance* adalah syarat utama agar terwujudnya aspirasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Pertanggungjawaban (akuntabilitas) merupakan faktor utama untuk mewujudkan *good governance* dan menjadi tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan.

Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat setiap tahunnya karena adanya penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri keuangan desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola keuangan desa.

Sulistiyani (dalam Subroto, 2009:29) mengemukakan akuntabilitas mengandung kewajiban untuk mengutarakan serta memberitahukan semua aktivitas terkhusus dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas akan terselenggara jika seluruh pihak berkepentingan diberikan akses, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban pengambil keputusan serta pelaksana baik di tingkat program, daerah, dan masyarakat..

Akuntabilitas mengandung informasi segala program, aktivitas, maupun kegiatan serta kinerja keuangan kemudian disampaikan kepada masyarakat secara keseluruhan.

UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas proporsionalis, asas profesionalitas, serta asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas ialah asas yang mengharuskan setiap aktivitas serta hasil akhir dari kegiatan pelaksanaan negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas menuntut seluruh instansi pemerintah menyajikan laporan pertanggungjawaban baik secara horizontal ataupun vertical sehingga dapat menjamin kinerja aparatur pemerintahan. Kaho (dalam Subroto, 2009:31) menjelaskan bahwasannya pemerintah tidak akan bisa menyelenggarakan fungsinya secara efektif serta efisien jika tiada dana mencukupi agar mampu memberikan pelayanan sertapembangunan.

Ditingkat pemerintahan desa diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU tersebut pemda, pemkab kabupaten/kota memberikan wewenang otonomi kepada pemerintah desa untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan desa. Pasal 71 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa

“Keuangan Desa merupakan keseluruhan hak serta kewajiban Desa yang bisa dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang serta barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban desa. Keuangan ialah tolok ukur guna mengetahui dengan rill kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri”

Cara mengetahui apakah tujuan-tujuan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan sebagai bentuk akuntabilitas memerlukan penggunaan prinsip-prinsip. Akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas adalah wujud tanggung jawab individu atau unit organisasi atas pengolahan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh media akuntabilitas reguler, prinsip akuntabilitas masyarakat yaitu yaitu kemampuan untuk secara teratur menjawab setiap pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana seseorang dalam suatu unit organisasi menggunakan kekuasaannya, di mana sumber daya tersebut digunakan, dan hasil yang dicapai melalui penggunaan sumber daya tersebut serta konsekuensi dari penggunaan sumber daya tersebut.

Salah satu wujud pelaksanaan akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakat adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan desa terhadap penggunaan wewenang yang diamankan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dalam proses percepatan pembangunan desa.

Keuangan desa tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga pemerintah desa perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam rangka pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan dalam keuangan desa terdiri dari atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa; alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari APBDP, hal ini diatur pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Beragamnya sumber keuangan tersebut menuntut pemerintah desa melakukan kinerja dengan baik.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (6) Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh aktivitas meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selama ini pemerintahan kabupaten

Desa Kota Agung merupakan salah satu dari 22 desa yang ada di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat. Desa Kota Agung merupakan ibukota kecamatan di Kecamatan Kota Agung. Desa Kota Agung mempunyai luas wilayah 5,88 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2023 jiwa. Setiap tahunnya keuangan desa Kota Agung selalu meningkat. Pada tahun anggaran 2018-2019 terjadi peningkatan pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kota Agung yaitu pada tahun anggaran 2018 pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,00 kemudian terjadi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun anggaran 2018 menjadi Rp. 1.160.000.000,00 selanjutnya pada tahun anggaran 2019 pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah sebesar Rp. 1.280.000.000,00 kemudian terjadi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun anggaran 2019 menjadi Rp. 1.330.500.000,00. Berikut perbandingan kenaikan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kota Agung tahun anggaran 2018-2019.

Tabel 1. Perbandingan Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kota Agung dari Tahun Anggaran 2018-2019

No	Jenis Pendapatan	Jumlah Anggaran	
		2018	2019
1	Pendapatan Asli Desa (PADes)	4.500.000,00	2.200.000,00
2	Hasil Usaha Desa	-	-
3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	3.000.000,00	1.500.000,00
4	Dana Desa yang Bersumber dari APBN	605.523.000,00	768.245.558,00
5	Alokasi Dana Desa	153.420.000,00	327.250.045,00
	Jumlah	766.443.000,00	1.099.195.605,00

Sumber: Diadopsi oleh Penulis Berdasarkan APBDes Kota Agung Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui pada setiap tahunnya pendapatan Desa Kota Agung meningkat cukup signifikan meskipun pendapatan menurun tidak stabil pada sumber pendapatan tertentu. Oleh karena itu, aparat desa makin didesak untuk melakukan kinerja terbaik terkhusus pada bidang pengelolaan keuangannya.

Secara tidak langsung penyelenggaraan pembangunan desa bisa dikatakan tidak maksimal, pembangunan yang semestinya dapat bertahan lama serta dipelihara menggunakan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Selain itu, minimnya pembangunan desa serta anggaran yang harusnya dipergunakan untuk pembangunan fisik tetapi hanya merenovasi bangunan lama pada tahun anggaran sebelumnya. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum maksimal.

Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 38 menyatakan bahwasannya kepala desa harus melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan desa merupakan cara untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan desa, yaitu laporan keuangan dari APBDes. Meskipun pada laporan tertulis realisasi 100 persen pemerintah desa tetap dituntut melakukan kinerja pengelolaan keuangan serta bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam tentang pengelolaan keuangan desa dikarenakan keuangan desa meningkat pada setiap tahunnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan Desa Kota Agung demi kepentingan peningkatan pengelolaan keuangan Desa Kota Agung. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (studi di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan permasalahan penelitian ini, yaitu Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, serta guna ditemukannya cara untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini ialah masukan kepada desa terkhusus Desa Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat tentang perlunya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat program-program desa supaya penggunaan anggaran keuangan desa lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Data dari Buku

- Hardiyansyah. (2012). *Sistem Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kumotoromo, W. (2008). *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Lionardo, A. (2011). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Palasong, H. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Soleh, C. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Jatinangor: Fokusmedia.
- Sudjana, N. (2011). *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Teori Konsep Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suparmoko, M. (2012). *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE.
- Syafiie, I. K. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, B. N. (2009). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penullis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group.

B. Sumber Data dari Peraturan dan Lainnya

- Desa Kota Agung. 2017. *Peraturan Desa Kota Agung Nomor 00 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)*. Kota Agung: Pemerintah Desa Kota Agung.
- LAN Ddn BPKP. 2000. *Akuntabilitas Dan Good Governace Modul 1 Dan 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.(AKIP)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Maryati, Sri. 2016. *Akuntabilitas Dan Stimulan Percepatan Pembangunan Insfratraktur Pedesaaan (SPPIDES) Di Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur*. Skripsi tidak Diterbitkan. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.